

Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh

Safuridar

Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

email: safuridar@unsam.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana peranan instrumen kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dalam penelitian ini peneliti mengamati instrumen kebijakan moneter berupa simpanan giro minimum (*reserve requirement*), fasilitas diskonto (*discount policy*) dan operasi pasar terbuka (*open market operation*). Ketiga instrumen ini akan dianalisis dengan menggunakan tolak ukur stabilitas moneter diantaranya: a) laju inflasi, b) suku bunga, c) jumlah uang beredar. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah dokumen yang dihasilkan melalui Data BPS Provinsi Aceh dan Data Bank Indonesia yang memiliki data terstruktur untuk membuat hasil yang efektif dalam penentuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kebijakan moneter dalam mempengaruhi perekonomian di Propinsi Aceh dapat terlihat penurunan tekanan jumlah uang beredar selama periode tahun 2013 sampai dengan 2014. Pada triwulan I 2013, untuk menurunkan jumlah uang beredar Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga dari 7,5% di tahun 2013 sampai 7,75% di tahun 2014. Kebijakan moneter lainnya juga diterapkan pada Simpanan Giro Minimum, Pada triwulan I 2015, jumlah penetapan jumlah simpanan giro minimum Aceh meningkat hingga 575575,54. Jumlah ini terus meningkat hingga triwulan akhir 2015 sebanyak 12,03% yaitu sebesar 585905,61. Dikarenakan jumlah peredaran uang di akhir tahun 2015 sudah semakin tinggi, maka pada triwulan I 2016, Bank Indonesia meningkatkan simpanan minimum giro Aceh sebesar 606385,47. Dan jumlah ini juga terus bertambah hingga 24,51% di akhir tahun 2016 yaitu sebesar 729518,83.

Kata kunci: laju inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ekonomi global saat ini, uang sering kali dijadikan tolak ukur untuk mengetahui perkembangan ekonomi di dalam negeri. Kebijakan moneter adalah salah satu dari kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengarahkan perekonomian kearah yang lebih baik. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengatur peredaran jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat kemudian mengarahkannya kepada otoritas moneter.

Nanga (2010:180) mendefinisikan kebijakan moneter adalah kebijakan yang

dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan perubahan uang beredar (*money supply*) dan tingkat suku bunga (*interest rate*) untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan didalam perekonomian. Dengan kebijakan moneter pemerintahan juga dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, kredit dan sistem perbankan.

Peredaran uang beredar perlu menjadi suatu syarat kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter ketika sampai di masyarakat. Hal ini menjadi suatu

pemikiran yang sangat penting untuk bisa otoritas moneter menjaga kestabilan moneter untuk menciptakan kondisi perekonomian yang harmonis. Keharmonisan kondisi moneter dalam perekonomian dapat terlihat bagaimana kondisi di dunia usaha tetap bisa menghasilkan output yang tinggi.

Sudirman (2011: 101) menyebutkan adapun beberapa hasil dari kebijakan Bank Indonesia dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan seperti operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing,

penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

Untuk menjaga kestabilan sistem perbankan, Bank Indonesia menetapkan cadangan minimum atau simpanan giro minimum yang harus dimiliki sejumlah bank. Cadangan minimum ini adalah sejumlah alat likuid berupa uang kas dan rekening giro di bank sentral. Penetapan simpanan giro minimum oleh Bank Indonesia memiliki perubahan setiap tahunnya. Perkembangan simpanan giro minimum Bank Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Simpanan Giro Tahun, Suku Bunga dan JUB 2010-2016

No	Tahun	Jumlah Simpanan Giro (Milyar Rupiah)	Suku Bunga (%)	Jumlah Uang Beredar (Milyar Rupiah)
1.	2010	345183,75	6,50	2471205,8
2.	2011	415231,38	6,00	2877219,6
3.	2012	479754,78	5,75	3307507,6
4.	2013	487474,48	7,50	3730409,4
5.	2014	522959,5	7,75	4173326,5
6.	2015	585905,61	7,50	4548800,2
7.	2016	729518,83	6,50	5004976,7

Sumber: BI, BPS Aceh, 2018

Peredaran jumlah uang yang sangat tinggi di masyarakat juga sangat mempengaruhi kestabilan nilai mata uang. Hal ini juga menyebabkan kenaikan jumlah inflasi yang sangat besar. Dalam hal ini, kebijakan moneter harus mulai diterapkan untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil adalah dengan menarik minat masyarakat untuk menabung yaitu dengan meningkatkan suku bunga uang. Dengan kata lain, memindahkan jumlah uang beredar di masyarakat kepada Bank. Sebagai contoh perkembangan nilai suku bunga diskonto pada Bank Indonesia dari tahun 201-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

Setelah menyerap jumlah uang beredar dari masyarakat, Bank Indonesia juga harus mengatur strategi lainnya untuk menghindari pengendapan uang dalam sistem perbankan. Pengendapan jumlah uang beredar dalam

sistem perbankan dalam jangka waktu yang lama juga dapat merusak kestabilan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat inflasi ke arah yang sangat rendah atau disebut dengan deflasi. Kasus ini menuntut Bank Indonesia untuk melakukan kebijakannya dengan cara menyebarkan kembali uang kepada masyarakat. Cara ini dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga. Dengan kata lain, masyarakat akan mengambil dana dari Bank untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan perekonomiannya. Dengan pengaturan jumlah uang beredar oleh otoritas moneter sebagai salah satu kebijakan moneter sehingga terjadi perubahan suku bunga uang, maka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga serta keseimbangan neraca pembayaran dapat tercapai dan sasaran ekonomi makro dapat terwujud.

Kebijakan moneter lainnya yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral ialah dengan melakukan kegiatan Operasi Pasar Terbuka. Instrumen ini adalah cara yang paling fleksibel untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Kegiatan Operasi Pasar Terbuka dapat dilakukan Bank Sentral dengan frekuensi dan kuantitas sesuai dengan keinginan serta dapat dilakukan di pasar primer maupun sekunder.

Dengan menjual surat berharga, kemampuan likuid bank-bank akan berkurang sehingga kemampuannya memberikan kredit akan berkurang karena Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar atau sebaliknya. Perkembangan Operasi Pasar Terbuka dari tahun 2010 sampai dengan 2016, dijelaskan pada Tabel 1.

Khususnya di Provinsi Aceh, peran kebijakan moneter sangat mempengaruhi keharmonisan perekonomian di masyarakat. Pemerintah harus menjaga perekonomian agar berjalan dengan baik dan berkesinambungan sesuai dengan arah pembangunan ekonomi. Besarnya peran kebijakan moneter dapat dilihat pada kemampuannya dalam memengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran.

Di provinsi Aceh, sistem perekonomian secara umum dilandaskan pada sistem syariah. Begitu juga dengan sistem perbankan, bank-bank syariah mempunyai peranan penting dalam mengatur keuangan di Aceh. Berbeda dengan provinsi lain, dimana masyarakatnya lebih memilih bank-bank umum untuk menyelesaikan masalah perbankannya.

Pada umumnya, bank-bank konvensional menerapkan suku simpanan yang lebih tinggi dari pada suku bunga kredit. Hal ini dilakukan untuk menarik hasrat masyarakat untuk menabung. Namun, kebijakan ini tidak mendatangkan hasil yang cukup memuaskan. Kadangkala, masyarakat enggan untuk menabung dan memilih untuk memanfaatkan uang mereka di bidang perekonomian. Kebijakan yang salah ini mengakibatkan beberapa bank umum mengalami kerugian bahkan mencapai saldo debit.

Untuk mencegah beberapa masalah ekonomi diatas, pemerintah mengupayakan beberapa cara seperti yang terjadi pada tahun 1998. Pohan (2008: 187) menyatakan bahwa untuk mencegah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pada akhir Januari 1998 pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank umum nasional kepada para deposan dan kreditor dalam dan luar negeri. Jaminan tersebut diberikan baik kepada bank-bank yang ditutup dan bank-bank yang masih berjalan. Bagi bank-bank yang masih bisa diselamatkan, pemerintah memberikan bantuan likuiditas melalui Bank Indonesia (BLBI).

Berbeda dengan bank-bank umum, Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga kepada nasabahnya melainkan sistem bagi hasil. Kebijakan ini diterapkan Bank Syariah untuk menghindari virus *negative spread* yaitu kerugian yang disebabkan besarnya bunga simpanan melebihi bunga kredit. Berdasarkan beberapa perbedaan antara sistem perekonomian di provinsi Aceh dan provinsi lainnya, maka kebijakan moneter yang harus diterapkan di provinsi Aceh berbeda pula dengan provinsi lain.

Berdasarkan latar belakang penelitian, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis peranan instrumen kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan bahan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai maupun sebagai perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Selain sebagai gambaran keberhasilan perekonomian dibidang pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dijadikan indikator utama karena memberikan implikasi pada kinerja perekonomian pembangunan lainnya. Pertumbuhan ekonomi merefleksikan perkembangan aktifitas perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah

menunjukkan semakin berkembangnya aktifitas perekonomiannya.

Menurut Putong (2009 :391), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan pekerjaan) dalam suatu periode perhitungan tertentu. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (Gross Domestic Product) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2000: 5).

Teori pertumbuhan ekonomi di bagi menjadi tiga yaitu, teori klasik, teori neo klasik dan teori modern.

a. Teori Klasik

1. David Ricardo

Menurut David Ricardo, tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu, Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Dengan terbatasnya luas tanah maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal yang kita kenal dengan istilah *the law of diminishing returns*. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka penduduk akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada gilirannya akan menekankan tingkat upah ke bawah.

2. Thomas Robert Malthus

Teori pertumbuhan penduduk yang menyatakan bahwa “pertumbuhan penduduk menurut deret ukur dan pertumbuhan ekonomi menurut deret hitung”. Maksudnya adalah bahwa jumlah penduduk akan berkembang lebih cepat dari pada pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan upah tenaga kerja menjadi sangat murah dan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari.

b. Teori Neo Klasik

1. Robert Sollow

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital dan kemajuan teknologi.

c. Teori Modern

Teori pertumbuhan ekonomi modern yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow merupakan garda depan dari linear stage of growth theory. Rostow membagi proses pertumbuhan ekonomi suatu Negara menjadi lima tahap yaitu perekonomian tradisional, prakondisi tinggal landas, tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi massa tinggi.

Sistem Keuangan

Ada banyak para ahli ilmu ekonomi yang mendefinisikan makna sistem keuangan, salah satunya adalah Pohan (2008:78) menurutnya sistem keuangan adalah suatu system yang terdiri atas lembaga-lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan pembiayaan tidak perlu dilakukan secara langsung dari golongan masyarakat yang kelebihan dana ke golongan masyarakat yang memerlukan dana.

Sudirman (2011:127) menyatakan bahwa sistem keuangan (*financial system*) terdiri dari system keuangan moneter dan sistem keuangan nonmoneter, dimana system keuangan moneter mencakup sistem otoritas moneter, yaitu bank sentral dan system perbankan yang mencakup bank umum dan bank perkreditan rakyat serta system otoritas

nonmoneter mencakup asuransi, pegadaian, leasing, modal ventura dan dana pensiun.

Lembaga dalam Sistem Keuangan

Sebelum kita membahas tentang lembaga dalam sistem keuangan maka terlebih dulu kita memahami tentang sistem keuangan moneter. Dalam hal ini, Sudirman (2011:129) menyebutkan ada dua sistem dalam keuangan moneter diantaranya:

1. Otoritas Moneter

Otoritas moneter diemban oleh Bank Sentral dengan kelebagaannya, organisasinya, dan kebijakannya. Kelebagaannya bank sentral mengalami perubahan (struktur maupun bentuknya) dari waktu ke waktu, sehingga juga mengalami perubahan baik tujuan dan tugasnya, hubungan bank sentral dengan pemerintah, hubungan internasional, tentang gubernur bank sentral, independensinya dan akuntabilitas serta transparansinya. Dalam organisasi bank sentral dapat dilihat visi, misi, nilai-nilai dan sasaran strategis, struktur organisasinya, implikasi tujuan, tugas dan wewenang organisasinya. Kebijakan bank sentral adalah khusus dibidang moneter dan sistem pembayaran.

2. Perbankan.

Sistem perbankan terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat yang dibina oleh bank sentral. Bank sentral memiliki otoritas terhadap moneter sehingga tidak melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dan perkreditan rakyat melakukan kegiatan atas dasar pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral sehingga bank umum dan bank perkreditan rakyat disebut bank pelaksana. Dengan undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan yang disempurnakan dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat banyak, maka pemberian kredit oleh bank adalah sebagai salah satu wujud

pelaksanaan kebijakan moneter untuk mengubah jumlah uang beredar dimasyarakat.

Lembaga keuangan dapat mengumpulkan dana dalam jumlah yang kecil-kecil untuk membiayai proyek yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Disamping itu, meskipun dana dan jangka waktu dari pinjaman tidak sama, pembiayaan dapat dilaksanakan melalui lembaga keuangan. Pohan (2008: 80) menyatakan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia saat ini terdiri atas:

1. Bank sentral

Dalam UU No. 23 tahun 1999 yang kemudian diamandemenkan dalam UU No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang tujuannya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

2. Perbankan

Perbankan di Indonesia saat ini di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Menurut UU tersebut perbankan di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).

3. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

LKBB adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke masyarakat terutama guna membiayai berbagai kegiatan.

Peranan Sistem Keuangan Moneter

Todaro dan Smith (2006 : 310) menyatakan bahwa sektor moneter menyediakan enam fungsi utama yang sangat penting pada lingkup perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan. Adapun fungsi utama tersebut terdiri dari :

1. Menyediakan Jasa Pembayaran

Akan merepotkan, tidak efisien dan beresiko jika kita harus membawa-bawa

uang tunai dalam jumlah banyak untuk membayar barang dan jasa yang dibeli. Lembaga keuangan menyediakan alternative yang efisien seperti cek, kliring pribadi dan komersial, serta jasa kartu kredit maupun debit yang masing-masing menjadi semakin penting setidaknya di sektor modern, bahkan dinegara-negara berpendapatan rendah.

2. Menghubungkan Para Penabung dengan Investor.

Meskipun banyak orang yang menabung seperti untuk masa pensiunnya, dan banyak orang yang mempunyai proyek investasi seperti membangun sebuah pabrik atau memperbanyak persediaan yang dimiliki oleh bisnis kecil keluarga, akan sulit mempertemukan masing-masing investor yang sama persis dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mendanai proyek mereka. Oleh karena itu, para penabung dan investor harus bertemu dan menyepakati segala hal mengenai persyaratan pinjam meminjam atau segala bentuk pendanaan yang lain.

3. Menghasilkan dan Menyebarkan Informasi.

Setiap orang tidak selalu berfikir seperti ini, namun dari sudut pandang sosial secara luas, salah satu fungsi dari system moneter yang paling penting adalah untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi. Harga saham dan obligasi di surat kabar harian di Negara-negara merupakan contoh yang cukup sering kita jumpai, harga-harga ini merupakan penilaian rata-rata oleh ribuan, jika bukan jutaan investor yang didasarkan pada informasi yang tersedia mengenai berbagai jenis investasi.

4. Mengalokasikan Pinjaman Secara Efisien.

Penyaluran dana investasi pada berbagai penggunaan yang menghasilkan tingkat pengembangan tertinggi akan meningkatkan spesialisasi dan pembagian tenaga kerja yang sudah dikenal sejak jaman Adam Smith sebagai kunci kemakmuran suatu Negara.

5. Risiko Penentuan Harga, Risiko Pengumpulan dan Risiko perdagangan.

Pasar asuransi menyediakan perlindungan terhadap risiko, namun demikian pula diverifikasi yang dapat dilakukan di pasar saham atau dalam sindikat pinjaman perbankan.

6. Meningkatkan Likuiditas Aset.

Beberapa investasi berjangka sangat panjang, dalam sejumlah kasus pembangkit listrik tenaga air. Misalnya investasi semacam itu yang mungkin berkeinginan untuk menjual surat berharganya pada suatu saat.

Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar di luar kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi perekonomian. Jumlah uang beredar atau penawaran uang dapat direncanakan oleh otoritas moneter untuk mengimbangi permintaan akan uang oleh masyarakat sehingga dapat di wujudkan keseimbangan moneter. Menurut Sudirman (2011: 157) proyeksi penawaran terhadap uang dapat di perinci menurut faktor- faktor yang mempengaruhinya, seperti:

1. Aktiva luar negeri atau *net foreign asset* atau NFA.
2. Aktiva dalam negeri atau *net domestic assets* atau NDA yang terdiri dari:
 - a. Tagihan bersih kepada pemerintah atau *net credit on government* atau NCG.
 - b. Kredit perbankan atau *net domestic credit* atau NDC.
 - c. Aktiva bersih lainnya atau *net other investment* atau NOI.

Menurut Arief (2010:28) menyatakan terkait dengan kebijakan moneter yang dilaksanakan, maka uang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kebijakan moneter meliputi :

- a. Uang beredar (MO) terdiri dari uang kartal yang berada diluar Bank Indonesia serta giro Bank umum dan giro swasta pada beraldo kredit pada bank Indonesia.
- b. Uang beredar dalam arti sempit (MI) yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kerta dan uang logam yang

berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPKN dan Bank Umum. Sementara uang giral terdiri dari rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan dalam rupiah yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam rupiah pada sistem moneter.

- c. Uang beredar dalam arti luas (M2) adalah kewajiban system moneter yang terdiri atas uang kartal, uang giral, dan uang kuasi.

Tolak Ukur Kebijakan Moneter

Pohan (2008:51) menyatakan bahwa ada empat indikator yang menjadi instrumen dalam kebijakan moneter. Diantaranya:

1. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan gambaran harga-harga. Harga yang membumbung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara itu, harga yang relatif stabil dalam angka inflasi yang rendah.

2. Suku Bunga

Perkembangan tingkat bunga yang tidak wajar secara langsung dapat mengganggu perkembangan perbankan. Suku bunga yang tinggi, disatu sisi, akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga dana perbankan akan meningkat. Sementara itu, di sisi lain suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha sehingga mengakibatkan penurunan kegiatan produksi di dalam negeri. Pohan (2008:42) menambahkan kerangka kebijakan moneter dengan menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional. Perbedaan mendasar antara *interest rate targeting* dan *monetering targeting* adalah bahwa *interest rate targeting* digunakan suku bunga sebagai sasaran operasional, sementara pada *monetering targeting*, uang beredar digunakan sebagai sasaran operasional. Di Amerika Serikat, kita mengenal *fed fund rate* sebagai sasaran operasional, sementara di Indonesia kita mengenal *BI rate* sebagai sinyal suku bunga operasional yang ditetapkan oleh BI

3. Nilai Tukar Mata Uang

Tolak ukur lainnya adalah nilai tukar. Pengelolaan nilai tukar yang realistis dan perubahan yang cukup rendah dapat memberikan kepastian dunia usaha sebagaimana yang terjadi pada beberapa waktu terakhir merupakan suatu hal yang penting dalam peningkatan investasi maupun kegiatan yang berorientasi pada ekspor. Keadaan tersebut pada gilirannya akan mendorong meningkatkan permintaan kredit untuk usaha yang produktif sehingga dapat mendorong perkembangan perbankan yang sehat. Pohan (2008:215) menambahkan bagi perekonomian terbuka seperti Indonesia, nilai tukar sangat berpengaruh pada inflasi. Sebagai contoh depresiasi nilai tukar dapat menyebabkan inflasi, baik melalui dampak *passtrough* karena kenaikan harga impor maupun melalui meningkatkannya permintaan agregat dari kenaikan ekspor. Selain itu, masyarakat selalu memonitor perubahan nilai tukar setiap hari sehingga perubahan nilai tukar mudah sekali dijadikan indikator kinerja utama Bank sentral. Namun demikian, sangat besarnya nilai tukar terhadap perekonomian tidak berarti bahwa kerangka *inflation targeting* terlalu memfokuskan pada perubahan nilai tukar. Bahayanya adalah bank sentral bisa terjebak pada risiko digunakannya nilai tukar sebagai jangkar utama, melebihi target inflasi yang seharusnya menjadi jangkar utama dalam ITF.

4. Ekspektasi Masyarakat

Perubahan ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan moneter dapat memengaruhi kinerja perekonomian. Perubahan ekspektasi terhadap moneter dapat melalui perubahan ekspektasi harga atau inflasi dan ekspektasi nilai tukar.

Instrumen Kebijakan Moneter

Pohan (2008: 38) menyatakan didalam pelaksanaan kebijakan moneter, bank sentral biasanya menggunakan beberapa piranti sebagai instrument dalam mencapai sasaran. Diantara instrument itu adalah cadangan wajib minimum (*reserve requirement*), Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*), fasilitas diskonto (*discount*

policy), dan imbauan (*moral suasion*). Ditambahkan oleh Syukri (2010) Kebijakan moneter dalam perekonomian modern dilakukan melalui berbagai instrument, yaitu operasi pasar terbuka (*open market operation*), penentuan tingkat bunga, ataupun penentuan besarnya cadangan wajib dalam sektor perbankan.

1. Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*)

Dengan Operasi Pasar Terbuka, bank sentral dapat memengaruhi sasaran operasionalnya, yaitu suku bunga atau jumlah uang beredar secara lebih efektif karena sinyal arah kebijakan moneter dapat disampaikan melalui pasar terbuka yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara terbuka dan pembentukan suku bunganya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Operasi Pasar Terbuka dapat juga dilakukan atas dasar inisiatif bank sentral dengan frekuensi dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan. Operasi Pasar Terbuka berbentuk kegiatan jual beli surat berharga (Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang) oleh bank sentral di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau nonlelang.

2. Fasilitas Diskonto (*discount policy*)

Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit atau simpanan yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan memengaruhi permintaan kredit dari bank. Dalam hal bank sentral menginginkan terjadinya kenaikan suku bunga maka bank sentral dapat memberikan sinyal melalui kenaikan tingkat diskonto (bunga) fasilitas itu. Tingkat bunga diskonto ada di atas suku bunga pasar uang atau di bawah suku bunga pasar uang. Jika bank sentral ingin menaikkan suku bunga kredit, bank sentral akan menaikkan suku bunga diskonto atau sebaliknya. Instrument ini berguna sebagai katup pengaman dalam menjaga stabilitas di pasar uang, sehingga bank-bank diharapkan untuk tidak sering

menggunakan fasilitas ini. Pinjaman di atas suku bunga intervensi bank sentral atau berupa simpanan dengan suku bunga di bawah pasar sehingga suku bunga diskonto menjadi patokan suku bunga pinjaman tertinggi atau suku bunga simpanan terendah.

3. Cadangan Wajib Minimum (*reserve requirement*)

Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank. Cadangan ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder.

a. Cadangan Primer

Cadangan primer yang dikenal juga dengan *reserve requirement* adalah instrument tidak langsung yang merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya alat likuid tersebut berupa uang kas dan rekening giro di bank sentral.

b. Cadangan Sekunder

Cadangan sekunder merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter.

4. Imbauan (*Moral Suasion*)

Selain instrument-instrumen di atas, bank sentral juga dapat melakukan imbauan kepada bank-bank untuk melakukan kebijakan tertentu. Imbauan ini bersifat tidak mengikat tetapi sebagai lembaga yang kredibel imbauan bank sentral biasanya memiliki dampak yang cukup efektif dalam kebijakan moneter.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengkaji seluruh instrument kebijakan moneter, tetapi hanya membatasi masalah penelitian pada beberapa instrument saja seperti Operasi Pasar Terbuka, Cadangan Wajib Minimum dan Fasilitas Diskonto. Mengenai tolok ukur untuk instrument yang dibahas, peneliti akan menjelaskannya dalam bentuk jumlah uang beredar, suku bunga dan inflasi.

Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia

Pohan (2008:95) membagi kerangka kebijakan moneter di Indonesia menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1. Kerangka Kebijakan Prakrisis 1997/1998.
Tekanan yang luar biasa terhadap nilai tukar dan cadangan devisa di awal krisis 1997 memaksa Bank Indonesia dan pemerintah melepas Bank intervensi dan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. Akibatnya, nilai tukar tidak lagi menjadi jangkar nominal kebijakan moneter. Untuk mencegah kehancuran system perbankan secara keseluruhan karena nasabah menarik sebagian besar simpanannya, Bank Indonesia menerapkan "the lender of last resort" atau yang lebih di kenal sebagai "Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)", terpaksa diberikan dalam jumlah yang sangat besar sejak akhir 1997. Akibatnya dari sisi uang moneter meningkat tajam. Pada tahun 1998 kebijakan moneter memasuki satu periode pengetatan terutama untuk mencegah terjadinya hiperinflasi, yaitu dengan berupaya menghentikan semua bentuk ekspansi moneter agar tidak terjadi kelebihan likuiditas dalam perekonomian.
2. Kerangka Kebijakan Moneter dalam UU No.23 Tahun 1999.
Krisis moneter 1997/1998 telah menuntut perubahan tatanan kelembagaan Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen. Perubahan ini didasari pada munculnya pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa salah satu penyebab krisis adalah ketidakmampuan Bank Indonesia bertindak objektif karena selama periode prakrisis kebijakan Bank Indonesia selalu dianggap terkait dengan kepentingan politik pemerintah. Perubahan tatanan ini diwujudkan pada penggantian undang-undang No. 13 Tahun 1968 dengan undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
3. Kerangka Kebijakan Moneter Pasca UU No.23 Tahun 1999.
Berlakunya UU No.23 Tahun 1999 memberi landasan hukum yang kuat bagi penerapan suatu kerangka kebijakan moneter berdasarkan ITF. Walaupun

demikian, undang-undang tidak mengamanatkan Bank Indonesia untuk mengadopsi suatu kerangka kebijakan moneter berdasarkan ITF. Hal ini adalah pilihan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

Disisi lain Sudirman (2011:141) mempermudah pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia, kebijakan dan pelaksanaan kebijakan moneter dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fase yaitu:

1. Kebijakan Moneter Sebelum Tahun 1983.
Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia mendirikan Bank Sirkulasi yang berbentuk bank milik Negara bernama Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1946. Tahun 1953, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.11 Tahun 1953 tentang pokok-pokok Bank Indonesia sebagai pengganti *Javasche Bank Wet* tahun 1922. Dengan dasar undang-undang ini dibentuklah Dewan moneter dengan Menteri Keuangan sebagai ketua, Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.
2. Kebijakan Moneter Selama Tahun 1984-1996.
Dengan merosotnya harga minyak di pasar dunia mulai tahun 1980-an sebagai akibat adanya resesi dunia menyebabkan terbatasnya penerimaan Negara. Oleh karena itu, sejak awal decade 1980-an pemerintah menempuh kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan bahkan liberalisasi di berbagai sector ekonomi, baik sector perbankan dan keuangan, perdagangan dan investasi.
3. Kebijakan Moneter Selama Tahun 1997-2003.
Bank Indonesia menilai bahwa pertimbangan berbagai indikator moneter selama tahun 2003 masih terkendali yang dicerminkan dari nilai tukar rupiah yang condong semakin kuat dan stabil yaitu Rp.8.300 per Desember 2003 menurun dari Rp. 10.400 per Januari 2003, inflasi terkendali dan menurun menjadi 5,33% per Desember 2003 yang menurun dari 15,13% per Januari 2003, uang primer yang indikatif dan suku bunga yang

menurun menjadi 8,3% untuk suku bunga sertifikat Bank Indonesia per Desember 2003 dari sebelumnya berkisar 20,12% per Januari 2003. Menguatnya nilai rupiah terjadi karena keberhasilan campur tangan Bank Indonesia dalam pasar valuta asing. Walaupun terjadi kenaikan inflasi pada saat tertentu yang disebabkan oleh faktor musim, namun mulai tahun 2002 tingkat inflasi kumulatif condong menurun sebagaimana dalam bulan Desember 2003.

4. Kebijakan Moneter Selama Tahun 2004-2011.

Krisis moneter telah berubah cepat menjadi krisis ekonomi, krisis social budaya, krisis politik atau krisis multidimensi. Salah satu pemicu utama krisis tersebut adalah kelangkaan dana perbankan sebagai akibat penarikan dana oleh masyarakat yang sangat besar, bersamaan dengan melemahnya nilai rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin berkurang sehingga nilai rupiah terus mengalami penurunan yang sangat tajam. Untuk mencegah kehancuran sektor perbankan, bank Indonesia menyuntik dana ke sektor perbankan dalam jumlah yang sangat besar, yang selanjutnya berakibat pada melonjaknya laju inflasi.

Target Kebijakan Moneter.

Dalam melaksanakan kebijakan moneter agar tujuan pembangunan ekonomi tercapai sebagai sasaran akhir, pada umumnya otoritas moneter atau bank sentral menggunakan sasaran antara (*intermediate target*) sebagai strategi operasional atau sasaran antara digunakan sebagai indikator dalam pencapaian sasaran akhir dari kebijakan moneter.

Sudirman (2011:95) menyatakan dalam memilih variabel yang tepat untuk digunakan sebagai indikator, sering merupakan sesuatu yang krusial dalam memformulasikan suatu kebijakan moneter karena variabel yang berbeda mencerminkan hal yang berbeda yang dihadapi oleh bank sentral. Pada umumnya bank sentral dihadapkan pada dua pilihan, yaitu target kuantitas atau target harga. Target kuantitas dari kebijakan

moneter merupakan suatu agregat moneter baik berupa uang primer (*reserve money*) yang sering diberi notasi RM atau stok uang dengan definisi uang dalam arti sempit *narrow money* yang sering diberi notasi M1 atau definisi uang dalam arti luas (*broad money*) yang sering diberi notasi M2. Target harga mencakup tingkat suku bunga (*interest rate*) yang sering diberi notasi K untuk harga uang domestik terhadap uang asing.

3. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini mencakup Peranan Instrumen Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi dua yaitu:

- a. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa teori-teori para ahli, gambaran umum tentang objek yang diteliti dan data lainnya yang menunjang penelitian ini.
- b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah dokumen yang dihasilkan melalui Data BPS Provinsi Aceh dari website <http://aceh.bps.go.id/> dan Data Bank Indonesia dari website www.bi.go.id yang memiliki data terstruktur untuk membuat hasil yang efektif dalam penentuan kebijakan.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung peneliti melalui dokumentasi dan observasi pada data yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Aceh dari website <http://aceh.bps.go.id/> dan Data Bank Indonesia dari website www.bi.go.id.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Sekunder pada penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan kebijakan moneter seperti jumlah uang beredar, suku bunga, laju inflasi dan juga informasi lainnya yang mendukung penelitian ini.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian metode analisis data yang digunakan adalah Metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Adapun jenis-jenis analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kebijakan Moneter di Aceh

Pada umumnya, sistem perekonomian di Aceh didasari oleh sistem perekonomian Islam atau yang biasa disebut Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, dalam masalah keuangan dan perbankan pun masyarakat Aceh lebih tertarik pada bank-bank syariah dari pada bank-bank umum seperti di provinsi lainnya. Secara umum, perkembangan perbankan syariah di Aceh mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah unit dan jumlah nasabah bank syariah setiap bulannya.

Salah satu yang menyebabkan masyarakat Aceh lebih memilih bank-bank syariah dari pada bank umum adalah sistem bagi hasil. Pada umumnya, bank-bank konvensional menerapkan suku bunga simpanan yang lebih tinggi dari pada suku bunga kredit. Hal ini dilakukan untuk menarik hasrat masyarakat untuk menabung. Namun, kebijakan ini tidak mendatangkan hasil yang cukup memuaskan. Kadangkala, masyarakat enggan untuk menabung dan memilih untuk memanfaatkan uang mereka di bidang perekonomian. Kebijakan yang salah ini mengakibatkan beberapa bank umum mengalami kerugian bahkan mencapai saldo debit. Berbeda dengan bank-bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, sehingga dapat menghindari kerugian akan membengkaknya saldo debit. Untuk menghindari berbagai masalah yang terjadi pada sistem perekonomian khususnya dibidang perbankan, maka perlu diterapkannya kebijakan moneter. Ada

berbagai macam yang diterapkan untuk mengatur masalah moneter di Aceh. Dalam pembelajaran ini, penulis akan membahas tentang kebijaka-kebijakan moneter yang diterapkan dalam instrument Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*), Simpanan Giro Minimum (*reserve requirement*) dan Fasilitas Diskonto (*discount policy*).

Instrumen dan operasi moneter yang digunakan sebagai sinyal respon kebijakan moneter dan sasaran operasi moneter adalah suku bunga BI. Suku bunga BI diimplementasikan melalui operasi pasar terbuka (OPT) untuk SBI tenor 1 bulan. Pelaksanaan Kebijakan Moneter bisa ditinjau dari perkembangan jumlah uang beredar. baik uang primer (Mo), uang beredar dalam arti sempit (M1) maupun uang beredar dalam arti luas (M2). Untuk tolak ukur yang terakhir, peneliti juga menggunakan inflasi untuk mengetahui peranan kebijakan moneter dalam Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*) di Aceh.

Dalam instrumen Simpanan Giro Minimum (*reserve requirement*), peneliti akan membahas tentang sejumlah uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai simpanan wajib minimum yang harus dimiliki oleh bank-bank di Aceh. Serupa dengan Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*), peneliti juga akan menggunakan jumlah uang beredar, inflasi dan suku bunga Bank Indonesia untuk mencari peranan kebijakan moneter dalam instrumen Simpanan Giro Minimum (*reserve requirement*). Instrumen kebijakan moneter yang terakhir dibahas dalam pembelajaran ini adalah fasilitas diskonto (*discount policy*). Penetapan nilai suku bunga ini dilakukan untuk mengatur kestabilan jumlah uang beredar di masyarakat. Sama seperti instrumen sebelumnya, dalam hal ini peneliti juga akan membahas peranan kebijakan moneter yang diterapkan dalam fasilitas diskonto dengan menggunakan tolak ukur jumlah uang beredar, inflasi dan suku bunga Bank Indonesia.

Peranan Instrumen Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.

1. Peranan Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.

Kebijakan moneter lainnya yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral ialah dengan melakukan kegiatan Operasi Pasar Terbuka. Instrumen ini adalah cara yang paling fleksibel untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Kegiatan Operasi Pasar Terbuka dapat dilakukan Bank Sentral dengan frekuensi dan kuantitas sesuai dengan keinginan serta dapat dilakukan di pasar primer maupun sekunder. Dengan menjual surat berharga, kemampuan likuid bank-bank akan berkurang sehingga kemampuannya memberikan kredit akan berkurang karena Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar atau sebaliknya.

Perkembangan Operasi Pasar Terbuka dapat diamati dengan pertumbuhan jumlah uang beredar setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah uang beredar yang beroperasi dalam Pasar Terbuka berjumlah 2471205,8 milyar rupiah. Pada tahun 2011, jumlah uang beredar di Pasar Terbuka meningkat hingga 16,42% atau menjadi 2877219,5 milyar rupiah. Hal ini terjadi karena besarnya tagihan-tagihan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah seperti tagihan bersih, tagihan kepada pemerintah pusat dan tagihan kepada lembaga keuangan lainnya.

Jumlah uang beredar pada Pasar Terbuka pada tahun berikutnya terus meningkat, yaitu pada periode tahun 2012 sampai dengan 2014. Pada tahun 2012 jumlah uang beredar pada Pasar Terbuka Aceh sebesar 3307507,6 milyar rupiah. Pada periode tahun selanjutnya yaitu 2013, jumlah uang beredar meningkat menjadi 3730409,4 milyar rupiah. Hal ini dikarenakan pemberian pinjaman dari kepada masyarakat maka. Pada tahun 2014 jumlah uang beredar meningkat menjadi 4173326,5 milyar rupiah.

Pada triwulan I 2015 jumlah uang beredar di pasar terbuka Aceh masih meningkat hingga 19,61% atau menjadi 4246361,19 milyar rupiah. Nilai ini terus meningkat sampai dengan triwulan akhir 2015, yaitu pada angka 4548800,27 milyar rupiah. Namun pada awal triwulan 2016 jumlah uang

beredar pada pasar terbuka Aceh turun hingga sebanyak 10,02% yaitu 4498361,28 milyar rupiah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya tagihan bersih kepada pemerintah. Pada triwulan akhir 2016 jumlah uang beredar pada pasar terbuka Aceh kembali melonjak menjadi 5004976,74 milyar rupiah. Dan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah tagihan dan kepada bukan penduduk, aktiva dalam negeri dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

2. Peranan Kebijakan Fasilitas Diskonto (*discount policy*) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.

Mengatur suku bunga bank adalah salah satu dari kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank Indonesia. Menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga adalah satu cara untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Apabila peredaran jumlah uang sudah sangat tinggi, maka Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk menarik minat masyarakat untuk menabung, sebaliknya apabila peredaran jumlah uang sudah sangat rendah, maka Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengendapan uang yang terlalu lama sehingga dapat mengganggu kestabilan perekonomian di masyarakat. Oleh karena itu, tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berubah-ubah mengikuti perubahan keadaan jumlah uang beredar setiap tahunnya. Berikut ini adalah perkembangan suku bunga diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank di Aceh selama periode tahun 2010 sampai dengan 2016.

Pada tahun 2010, tingkat suku bunga diskonto untuk provinsi Aceh 6,5%. Dikarenakan peredaran jumlah uang beredar pada tahun 2010 masih dalam tingkat rendah, maka pada tahun 2011, tingkat suku bunga diskonto diturunkan menjadi 6%. Pada tahun 2012, tingkat suku bunga diskonto kembali diturunkan sampai 5,75%. Pada tahun 2013 sampai dengan 2014, jumlah uang beredar sudah cukup tinggi di Pasar Terbuka Aceh. Oleh karena itu, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunganya dari 7,5% di tahun 2013 menjadi 7,75% di tahun 2014.

Pada tahun 2015, jumlah uang beredar di masyarakat sudah hampir stabil, sehingga Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga diskonto hanya pada batas 7,5% saja. Pada triwulan I 2016, jumlah uang beredar menurun sehingga tingkat suku bunga diskonto kembali diturunkan 7,5%. Sampai pada triwulan akhir tahun 2016, jumlah uang beredar naik hingga mencapai 5004976,79 milyar rupiah, sehingga pada akhir tahun 2016 tingkat suku bunga diskonto kembali diturunkan menjadi 4,75%. Selain dari nilai tingkat suku bunga, fasilitas diskonto juga dapat diamati dalam bentuk laju inflasi. Sebagai gambaran bagi pembaca, penulis memapar perkembangan inflasi dalam fasilitas diskonto di Aceh selama periode tahun 2010 sampai dengan 2016 sebagai berikut:

Tekanan inflasi tahunan provinsi Aceh dalam Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*) pada tahun 2010 tercatat mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, nilai inflasi pada Operasi Pasar Terbuka berada pada angka 3,72 meningkat menjadi 5,86 di tahun 2010. Namun, pada tahun selanjutnya dalam tahun 2011, nilai inflasi pada Operasi Pasar Terbuka Aceh mengalami deflasi sebanyak -70,84% atau turun hingga 3,43. Pada akhir tahun 2012 nilai inflasi pada Operasi Pasar Terbuka Aceh mengalami penurunan drastis, nilai inflasi turun hingga 0,93% atau menjadi 0,22. Nilai ini merupakan nilai inflasi terendah yang pernah dialami Aceh selama sepuluh tahun terakhir. Pada periode tahun 2013-2014 nilai inflasi pada Operasi Pasar Terbuka Aceh kembali membaik. Pada tahun 2013 nilai inflasi meningkat dari 7,31 menjadi 8,09 di tahun 2014. Pada tahun 2015, nilai inflasi turun sebanyak -81,08% atau menjadi 1,53. Namun perkembangan inflasi ini meningkat di tahun selanjutnya, pada akhir tahun 2016 nilai inflasi pada Operasi Pasar Terbuka Aceh kembali naik menjadi 3,95.

3. Peranan Kebijakan Simpanan Giro Minimum (*reserve requirement*) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh.

Dalam sistem perbankan, Bank Indonesia menetapkan Simpanan Giro Minimum yang

wajib dimiliki oleh sejumlah bank. Begitu juga di Provinsi Aceh, Bank Indonesia menetapkan Simpanan Giro Minimum pada bank-bank yang berada di Aceh. Penetapan Simpanan Giro Minimum ini, mengalami perubahan setiap tahunnya, yang mana perkembangannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Pada tahun 2010, jumlah simpanan giro minimum Aceh adalah 345183,75 milyar rupiah. Perkembangan jumlah simpanan giro minimum ini berubah setiap tahunnya, pada tahun 2011 meningkat sebanyak 20,29% hingga berjumlah 415213,38 milyar rupiah. Pada tahun 2012 Bank Indonesia menaikkan ketentuan giro minimumnya hingga 13,44% yaitu 479754,78 milyar rupiah. Dikarenakan peredaran jumlah uang yang sangat tinggi di masyarakat, maka pada tahun 2012-2013 penetapan jumlah simpanan giro minimum meningkat dari 478474,48 milyar rupiah menjadi 522959,5 milyar rupiah. Pada tahun 2014, jumlah simpanan giro minimum Aceh hanya mengalami sedikit peningkatan yaitu sebanyak 7,27% atau sebesar 522959,5 milyar rupiah. Pada triwulan I 2015, jumlah penetapan jumlah simpanan giro minimum Aceh meningkat hingga 575575,54 milyar rupiah. Jumlah ini terus meningkat hingga triwulan akhir 2015 sebanyak 12,03% yaitu sebesar 585905,61 milyar rupiah. Dikarenakan jumlah peredaran uang di akhir tahun 2015 sudah semakin tinggi, maka pada triwulan I 2016, Bank Indonesia meningkatkan simpanan minimum giro Aceh sebesar 606385,47 milyar rupiah. Dan jumlah ini juga terus bertambah hingga 24,51% di akhir tahun 2016 yaitu sebesar 729518,83 milyar rupiah. Peningkatan jumlah simpanan giro minimum ini dilakukan untuk menekan jumlah uang beredar yang semakin tinggi di masyarakat pada triwulan akhir tahun 2016 yang lalu.

Instrumen kebijakan moneter mempunyai peranan penting dalam mengatur jumlah uang beredar di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya dari tahun 2010-2016. Pada tahun 2010, jumlah uang beredar di masyarakat mencapai 2471205,8 milyar rupiah. Pada tahun 2011, Bank Indonesia menaikkan jumlah simpanan giro

minimum Aceh sebanyak 20,29%, disisi lain Bank Indonesia menurunkan suku bunga diskonto sebanyak 6%, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat meningkat sebanyak 16,42% atau menjadi 2877219,5 milyar rupiah hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah PDRB menjadi 108217625,2 milyar rupiah. Hal ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian. Dengan meningkatnya jumlah uang beredar, masyarakat dapat melakukan investasi diberbagai sektor industri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Aceh. Pada tahun 2012, nilai simpanan giro minimum Aceh meningkat sebanyak 13,44%, sementara suku bunga diskonto diturunkan menjadi 5,75%. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah uang beredar menjadi 3307507,6 milyar rupiah. Disisi lain, menurunnya jumlah inflasi memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan perekonomian. Namun masyarakat dapat lebih dulu memanfaatkan uangnya untuk investasi dan menabung. Pada tahun 2013, jumlah simpanan giro minimum Aceh dinaikkan menjadi 487474,48 milyar rupiah. Disisi lain, Bank Indonesia menaikkan suku bunga diskonto menjadi 7,5%, hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah uang beredar menjadi 3730409,4 milyar rupiah. Demikian juga dengan inflasi yang kembali meningkat menjadi 7,31%, dalam hal ini masyarakat dapat kembali menggunakan uangnya pada operasi pasar terbuka.

Pada tahun 2014, jumlah simpanan giro minimum aceh dinaikkan sebanyak 7,27%, sementara suku bunga diskonto meningkat menjadi 7,75%. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat sebanyak 11,87%. Sementara di pasar terbuka, inflasi terus terjadi hingga mencapai 8,09%. Hal ini memberi dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian, masyarakat dapat memanfaatkan kondisi ini dengan meningkatkan perekonomian di bidang produksi, sehingga pada tahun ini jumlah PDRB Aceh meningkat hingga 128026400 milyar rupiah. Peningkatan jumlah simpanan giro minimum Aceh juga terjadi pada tahun 2015, pada tahun ini, jumlah simpanan giro

minimum meningkat sebanyak 12,03%. Sebaliknya, Bank Indonesia menaikkan jumlah suku bunga diskonto menjadi 7,5%. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat menjadi 4548800,2 milyar rupiah. Sementara jumlah PDRB meningkat hingga 128980126,9 milyar rupiah, namun operasi pasar terbuka mengalami deflasi hingga 1,53%. Hal ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi untuk periode selanjutnya, apabila inflasi kembali terjadi maka terjadi ketidakstabilan di bidang perekonomian. Pada tahun 2016, jumlah simpanan giro minimum Aceh melonjak drastis sebanyak 24,51% atau menjadi 729518,83 milyar rupiah. Disamping itu, Bank Indonesia menurunkan nilai suku bunga diskonto menjadi 6,5%. Hal ini, ditujukan untuk meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat sebanyak 10,02% atau menjadi 5004976,7 milyar rupiah. Hal ini memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Kondisi ini mendorong investor untuk melakukan investasi, yang pada akhirnya akan menciptakan kenaikan output dan memicu pertumbuhan ekonomi.

5. PENUTUP

1. Peran dan kebijakan moneter dalam mempengaruhi perekonomian di Propinsi Aceh dapat terlihat penurunan tekanan jumlah uang beredar selama periode tahun 2013 sampai dengan 2014. Pada triwulan I 2013, untuk menurunkan jumlah uang beredar Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga dari 7,5% di tahun 2013 sampai 7,75% di tahun 2014.
2. Kebijakan moneter lainnya juga diterapkan pada Simpanan Giro Minimum, Pada triwulan I 2015, jumlah penetapan jumlah simpanan giro minimum Aceh meningkat hingga 575575,54 milyar rupiah. Jumlah ini terus meningkat hingga triwulan akhir 2015 yaitu sebesar 585905,61 milyar rupiah. Dikarenakan jumlah peredaran uang di akhir tahun 2015 sudah semakin tinggi, maka pada triwulan I 2016, Bank Indonesia meningkatkan simpanan

minimum giro Aceh sebesar 606385,47 milyar rupiah. Dan jumlah ini juga terus bertambah hingga akhir tahun 2016 yaitu sebesar 729518,83 milyar rupiah. Peningkatan jumlah simpanan giro minimum ini dilakukan untuk menekan jumlah uang beredar yang semakin tinggi di masyarakat pada triwulan akhir tahun 2016 yang lalu. Laju inflasi yang melonjak dapat membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan ekonomi, hal menyebabkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Namun, peningkatan jumlah uang beredar dan PDRB membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Aceh, dengan kata lain, masyarakat dapat memanfaatkan jumlah uang beredar untuk meningkatkan produktivitas di bidang perekonomian.

6. REFERENSI

- Ahmad Syukri, "Implementasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam" artikel ini diakses pada 20 Desember 2017 dari <http://asyukri.wordpress.com/2009/05/27/implementasi-kebijakan-moneter-dan-fiskal-dalam-islam-html>.
- Arief, Amril. 2010, Peranan Kebijakan Moneter dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, **JESP**, Vol.3 No.1, April 2010; Hal 27-35.
- C.Smith, Stephen dan Todaro, Michael P, 2006. **Pembangunan Ekonomi**, Jakarta:Erlangga
- Fadillah, Ade. 2015, Fenomena Ekonomi Islam di Tanah Rencong, **Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam**, Vol.1 No.2, Hal 124-136.
- PDRB <http://aceh.bps.go.id/> diakses pada tanggal 27 Desember 2017.
- Simpanan Giro, Jumlah Uang Beredar, Inflasi <http://www.bi.go.id> diakses pada tanggal 29 Desember 2017.
- Nanga, Muana, 2010, **Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan**, Jakarta: Rajawali Pres.
- Sudirman, Wayan, 2011, **Kebijakan Fiskal dan Moneter**, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Sugiyono, 2010, **Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D**. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadorno, 2007, **Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah dan kebijakan**, Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Setiawan, Iwan, 2009, Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, **Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akutansi**, Vol.5 No.01, Hal 41-49.
- Pohan, Aulia, 2008. **kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia** Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2008. **Potret Kebijakan Moneter Indonesia, Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia**, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putra, M. Umar Maya, 2015, Peran dan Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian Sumatera Utara, **Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil**, Vol.5 No.01, Hal 41-49.
- Todaro, Michael P, 2008, **Ekonomi Untuk Negara Berkembang**, Jakarta: Bumi Aksara.